



SELUMA

MINGGU, 23 OKTOBER 2022

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kembalikan Rp 400 Juta, Kasus Jalan Terus

SELUMA - Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma saat ini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dugaan penyelewengan di Sekretariat DPRD Kabupaten

Seluma anggaran tahun 2021 pada anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 13 miliar yang telah naik dari penyelidikan ke penyidikan.

Menariknya, berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun

2021 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Bengkulu terdapat temuan Rp 1,2 miliar pada belanja barang dan jasa baru dikembalikan sekitar Rp 400 juta.

Meski demikian, hal itu tidak akan menghilangkan tindak pidana lantaran perkara telah naik penyidikan dan penyidik menduga ada kerugian lebih besar dari temuan BPK RI.

"Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi pengembalian lagi. Namun harus ditegaskan meskipun temuan dikembalikan keseluruhan tidak akan menghilangkan pidana," kata Kepala Kejari Seluma Wuriadhi Paramita, SH M.H melalui Kasi Pidsus A.Gufron, SH, MH.

Tim Penyidik Pidsus Kejari Seluma menduga kuat ada transaksi belanja barang dan jasa yang tidak sesuai peruntukan dan ada transaksi yang tidak sebenarnya. Dalam belanja barang dan jasa, mulai dari belanja pegawai, perjalanan dinas, rapat, makan minum, ATK dan lainnya berkaitan dengan belanja barang dan jasa.

"Saat ini masih pemeriksaan saksi-saksi dari pihak ketiga karena ada banyak saksi yang terlibat dan mengetahui yang akan kami jwalkan pamanggilan," ujarnya.

Anggaran belanja barang dan jasa di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tahun 2021 sebesar Rp 13 miliar termasuk pemeliharaan gedung kantor DPRD Rp 350 juta dan rehab rumah dinas

pimpinan Rp 350 juta. "Kita menduga kuat tidak hanya temuan BPK tetapi lebih dari itu karena kami melihat potensi kerugian yang lebih besar dari temuan BPK," ujarnya.

Untuk diketahui, perkara yang telah dinaikan status dari penyelidikan ke penyidikan sejak dua pekan ini. Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan sedikitnya 25-30 saksi baik yang telah diperiksa pada saat penyelidikan atau pun yang belum. Kemudian kedepan ada sekitar 160 saksi yang akan dijadwalkan pemeriksaannya dan dilakukan secara maraton.

Kemudian dari hasil pemeriksaan sementara terhadap saksi-saksi ada sejumlah keterangan saksi yang menyampaikan mengeluh melakukan kerjasama dengan DPRD Kabupaten Seluma lantaran selalu diminta bukti belanja lebih dari apa yang dibelanjakan. "Pihak ketiga pun juga mengakui diminta membuat bukti belanja lebih dari yang dibelanjakan. Bahkan sudah banyak tidak lagi berkerja sama," ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemeriksaan

dilakukan kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan aitem rehab rumah dinas unsur pimpinan mulai dari pengadaan wallpaper, pengadaan sumur bor, pembelian alat rumah tangga, ATK, makan minum dan lainnya.

"Semua akan kita panggil untuk diperiksa karena belanja operasional melibatkan banyak pihak ketiga," ungkapnya.

Diketahui, pengusutan ini dilakukan sejak bulan Agustus lalu setelah adanya hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2021 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Bengkulu terdapat temuan Rp 1,2 miliar pada belanja barang dan jasa. Salah satunya pada perjalanan dinas di Sekretariat DPRD. Hasil penyelidikan yang telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu tim telah melakukan ekspos dan meningkatkan ke penyidikan perkara ini.

Berdasarkan LHP BPK tahun anggaran 2021 di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sebesar Rp 1,2 miliar belanja barang dan jasa sekitar Rp 900 juta lebih. Kemudian baru dikembalikan sekitar Rp 400 juta. **(juu)**